

Ada Apa Dengan *Whistle Blowing* Sistem

Nashirotn Nisa Nurharjanti
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Whistleblowing system is an alternative method that can be applied in the University environment to reduce academic fraud. Academic fraud is influenced by two factors, namely (1) internal, students want to get capabilities related to actualization, (2) external, too many student workloads. Factors can indicate students cheating, imitating, copying or plagiarism and presenting attendance. The purpose of this study is to explain what is happening with whistle blowing systems when applied in the University environment. This research was conducted using a narrative qualitative approach. The respondents used were students who had attended audit 1 and 2 lectures and professional ethics and sharia business, officials at the study program level and lecturer lecturers. The results of this study are the narratives of the respondents, (1) The response of students: (a) can freely report fraudulent acts that occur on campus, (b) have an awareness not to cheat, (c) if the whistle blowing system is implemented it can help socialize and monitoring the reporting process for fraud; (2) Responses from officials at the program level and lecturers; (a) the whistle blowing system helps the process of disclosure of academic fraud, (b) the quality of learning becomes quality so as to produce competent outcomes, (c) students comply with regulations without coercion. This response is in accordance with the stages of the work system of the whistle blowing system, which consists of anonymity, independence, easy access, follow-up.

Keywords: *Whistleblowing system, academic fraud, quality of graduates, competence of graduates, student awareness*

1. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Whistle blowing sistem merupakan sistem yang dibangun dengan tujuan untuk dapat mengungkap tindakan yang tidak beretika yang pada akhirnya bisa mengarah kepada tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut Bowers dalam McCabe (2001) bahwa 99 Perguruan Tinggi di Amerika dengan melibatkan 5000 mahasiswa atau tiga perempat responden pernah terlibat tindakan kecurangan dengan intensitas paling sedikit satu kali. Hal ini juga ditemukan di Indonesia bahwa 31,03% siswa Sekolah Menengah Umum

(SMU) ada kemungkinan melakukan tindakan yang tidak etis dengan cara menyalin pekerjaan rumah sedangkan sisanya 68,97% sesekali pernah menyalin pekerjaan rumah (Sudibyo, 2005). Pernyataan ini sama dengan penelitian Litbang Media Group yang menjelaskan bahwa siswa sekolah dari sekolah dasar hingga menengah terindikasi pernah melakukan tindakan tidak etis yang termasuk dalam kategori kecurangan akademik (*academic fraud*) yaitu menyalin pekerjaan rumah. Antara News (2010) mengungkapkan, Menteri

Pendidikan Muhammad Nuh mendapatkan informasi ada indikasi tindakan kecurangan dengan pembocoran soal ujian nasional yang hampir mencapai 472 kasus.

Academic Fraud (kecurangan akademik) ini pada kenyataannya terjadi sampai level Universitas (perguruan tinggi). Kompas (2010) menuliskan ada indikasi plagiarisme penulisan artikel harian nasional yang dilakukan seorang guru besar di suatu Universitas. Kurniawan (2011) menjelaskan bahwa *academic fraud* (kecurangan akademik) juga terjadi ketika mahasiswa mengikuti ujian tengah semester tahun akademik 2008/2009 dengan tujuan agar ujian tersebut dapat terselesaikan. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan ada indikasi bahwa potensi kecurangan bisa terjadi karena adanya kebiasaan menyontek yang dilakukan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus dari tenaga pendidik (dosen) bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada capaian nilai akan tetapi tenaga pendidik perlu memberikan tambahan materi disetiap sesi perkuliahan terkait dengan etika atau keperilakuan. Dosen juga memberikan contoh sikap yang beretika ketika melakukan aktivitas tri dharma (mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat) sehingga ada *role model* yang bisa dijadikan panutan mahasiswa.

Pihak Universitas selain membuat peraturan terkait dengan kode etik mahasiswa dalam proses belajar mahasiswa juga membuat *whistleblowing* sistem yang berfungsi sebagai aplikasi pelaporan pelanggaran terkait kode etik.

Kecurangan yang terjadi di lingkungan kampus disebabkan adanya dorongan (motivasi) yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul karena ada

keinginan aktualisasi diri mahasiswa terkait dengan kapabilitas (kemampuan), sedangkan faktor eksternal adalah adanya beban tugas yang terlalu banyak dari dosen. Kedua faktor ini bisa menjadi dorongan mahasiswa untuk melakukan tindakan *fraud* akademik dikarenakan ada kesempatan, peluang, tekanan dan pembenaran akan apa yang dilakukan. Tiga kondisi ini dikenal dengan teori *fraud triangle* yang diungkapkan oleh Donald Cressey (1950).

Tindakan yang terindikasi dikarenakan *fraud triangle* bisa membentuk suatu hirarki kecurangan karena dimulai dari lingkungan keluarga yang merupakan lapisan terbawah (pertama), kemudian masyarakat di lapisan kedua, tempat belajar di lapisan ketiga dan di tempat bekerja sebagai lapisan teratas. Hirarki kecurangan yang dilakukan di lingkungan kampus bisa terungkap apabila ada niat untuk menjadi *whistleblowing*. Putu dkk (2016) menyatakan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan untuk menjadi *whistleblower*.

Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB), menjelaskan bahwa niat timbul disebabkan 3 hal yaitu; 1) norma subyektif, yaitu sebuah motivasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar yang membuat ada suatu keyakinan serta pertimbangan dalam melakukan sesuatu. 2) sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) ditentukan oleh keyakinan atau kepercayaan yang kuat tentang benar tidak perilakunya melaporkan tindak kecurangan dan sudah mengetahui konsekuensi dari melaporkan tindak kecurangan yang disebut dengan *behavioral beliefs*. 3) Kontrol perilaku yang dipersepsi (PBC) adalah keyakinan seseorang terhadap kendala yang akan dihadapi ketika orang tersebut ingin melakukan suatu

tindakan. Apabila dilihat dari teori tersebut menjadi *whistleblower* harus ada dukungan dari pihak kampus karena dukungan ini akan mempengaruhi keyakinan pelapor apakah ada perlindungan dan apa konsekuensi menjadi *whistleblower*.

Bentuk perlindungan dan dukungan Universitas ini adalah dengan menerapkan sistem *whistleblowing*. Sistem *whistleblowing* untuk mengurangi kecurangan akademik memang belum banyak diterapkan di Universitas, *whistleblowing* yang sudah diterapkan di Universitas lebih ke arah proses penggadaan barang. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi Universitas untuk menerapkan karena memiliki kekuatan yaitu dapat mengurangi tindak kecurangan akademik. Contoh sistem *whistleblowing* yang bisa diadopsi untuk diterapkan adalah sistem *whistleblowing* di kementerian keuangan.

Kementerian keuangan mempunyai aplikasi yang bernama Wise. Cara kerja Wise adalah ditangani langsung oleh pusat (Inspektorat) namun ada dilakukan oleh unit, akan tetapi cara kerja sistem yang ada di unit memiliki keterbatasan yaitu pemberian wewenang berupa penerimaan data yang tidak utuh. Mekanisme proses dari sistem Wise dimonitoring IBI dan penyebab pelapor memiliki keberanian adalah jaminan yang peraturan PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

(*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim IBI menguatkan dengan adanya fitur optional kepada pelapor agar pihak pelapor merasa aman antara lain menjamin tempat mediasi, tidak dilakukan dokumentasi ketika proses mediasi berlangsung, dan ada alternatif mediasi yaitu melalui sms, pesan atau telpon. Intinya sistem ini dibangun dengan tujuan pelaporan yang dilaporkan akan ada kelanjutannya atau tidak dan dapat diketahui apakah laporan ini bersifat hoaxes (fitnah)¹.

Sistem yang telah dibangun Kementerian Keuangan ini tentunya juga bisa mengurangi atau mendeteksi kecurangan yang terjadi di lingkungan mahasiswa sehingga output jangka panjang Universitas makin dipercaya oleh masyarakat dan secara khusus akan meningkatkan kepercayaan akan profesi akuntansi. Profesi akuntansi sampai saat ini masih diharapkan merupakan profesi yang mampu menjaga integritas, objektivitas, profesionalisme dan independensi baik sebagai auditor maupun ahli akuntan lainnya.

Hal ini juga diungkapkan oleh Sulistomo (2012) profesi akuntan dan auditor dalam menjalankan profesinya memerlukan etika, karena profesi ini merupakan profesi yang mengedepankan profesionalisme, kejujuran, objektivitas dan keberanian untuk mengungkap kecurangan dengan kemungkinan resiko yang diterima.

Alasan lain adalah karena hasil kerja dari profesi ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga lulusan dari akuntansi diharapkan tidak

¹ Majalah auditoria inspektorat jenderal kementerian keuangan, "Whistleblowing System" 2013

memiliki budaya curang dalam penyelesaian akademik.

Oleh karena itu apabila sistem *whistleblowing* ini diaplikasikan maka dapat mengurangi tindakan kecurangan dan mampu membentuk mahasiswa akuntansi yang berkarakter yaitu berani bertindak jujur dan mengungkapkan tindakan kecurangan yang terjadi. Namun apabila hal ini ingin diterapkan maka perlu adanya sinergisme antara mahasiswa, dosen, pejabat struktural setingkat kaprodi, dekan, dan rektor dengan melihat fenomena dasar mahasiswa berbuat kecurangan, karena menurut Anderman (2006) menyatakan bahwa kecurangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi.

Manfaat dari *whistleblowing* sistem menurut Tuanakotta (2010), yaitu : 1. Adanya wadah untuk menyalurkan informasi yang penting dan mendesak bagi perusahaan yang kemudian informasi tersebut ditangani secara aman, 2. Prosentase Pelanggaran mengalami penurunan karena adanya peningkatan aduan dan kepercayaan terhadap sistem pengaduan yang dibuat secara efektif 3. Adanya sistem deteksi dini (*early warning system*) terkait probabilitas persitiwa yang mengarah kepada pelanggaran 4. Adanya peluang penanganan pelanggaran yang dilakukan secara internal, sebelum pelanggaran tersebut diketahui masyarakat (pihak eksternal) 5. Menurunkan resiko yang terjadi dalam suatu organisasi yang diakibatkan dari pelanggaran Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran yang bersumber dari keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi. 6. Sistem ini dapat menangani pelanggaran secara efisien sehingga biaya yang dikeluarkan sedikit 7. Pihak pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dan publik semakin percaya dengan perusahaan sehingga

reputasi perusahaan mengalami peningkatan. 8. Sistem ini mempunyai tujuan positif yaitu adanya masukan yang ditunjukkan untuk perusahaan terkait dengan proses kerja dengan memberikan kritikan terkait kekurangan pengendalian internal, sekaligus memperbaiki tindakan pelanggaran tersebut.

Menurut Amri (2008) tindakan yang dapat diasumsikan sebagai pelanggaran adalah tindakan yang melawan hukum seperti korupsi, dan kecurangan. Pendapat Amir (2008) ini berarti bisa diartikan kecurangan akademik merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh pelapor dengan itikad baik

Pengungkapan kecurangan akademik dengan menggunakan sistem ini bisa dilakukan apabila ada niat dan minat dari pelapor karena sistem ini memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan. Sistem ini dibangun dengan adanya kesepakatan antar prodi dalam satu fakultas dengan Universitas dengan mengelompokkan mahasiswa yang memiliki peran sebagai yaitu *Agent of Change, social control*, dan *Iron Stock*. *Agent of change* disini mahasiswa berperan sebagai pelapor sekaligus memberikan perubahan positif sehingga pimpinan menjadi tergelitik untuk ikut terlibat dalam perubahan tersebut.

Social Control mahasiswa disamping akan melaporkan tindakan kecurangan yang ada di dalam institusi, mahasiswa diharapkan memiliki kepedulian kepada kondisi yang terjadi pada saat ini yang kurang berpihak kepada masyarakat yang kemungkinan penyebabnya karena adanya kecurangan dalam sistem pemerintahan sehingga mahasiswa bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang agar kecurangan bisa dikurangi. *Iron stock* disini dimaksudkan mahasiswa

diharapkan memiliki etika, dan akhlak yang baik sehingga ketika ada tindakan kecurangan maka akan melaporkan. Penelitian ini akan mengkaji ada apa dengan sistem *whistleblowing* dengan melihat peranan mahasiswa, dosen dan pejabat struktural setingkat kaprodi dalam mewujudkan sistem ini karena apabila diwujudkan mampu mendeteksi kecurangan yang terjadi di kalangan akademisi.

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peranan *whistleblowing* sistem dalam mengurangi kecurangan akademik dikalangan mahasiswa
2. Membangun karakteristik lulusan yang profesional dan jujur sehingga memiliki keberanian untuk mengungkapkan kecurangan

2. Tinjauan Pustaka

Theori *Fraud Triangle*

1. Tekanan (*Prassure*)

Tekanan terjadi karena ada unsur-unsur yang menjadikan perilaku etis dapat terjadi. Perilaku tidak etis yang disebabkan karena adanya sebuah tekanan bisa menyebabkan adanya indikasi fraud. Pelaku fraud dalam melakukan tindakan tidak etis didasari karena adanya unsur tekanan (Abdullahi dan Mansor, 2015). Tekanan ini dapat dipengaruhi karena adanya tujuan ingin mendapatkan prestasi dalam bidang akademik melalui cara yang tidak etis dengan tujuan untuk membahagiakan orang tua.

2. Peluang (*Oppurtunity*)

Unsur penting kedua dari *academic fraud* (kecurangan akademik) yaitu adanya peluang untuk berbuat tidak etis. Konsep peluang dapat diartikan sebuah konsep yang menggambarkan adanya indikasi pemanfaatan keadaan oleh seseorang (Kelly dan Hartley, 2010). Hal ini juga

dijelaskan dalam penelitian Cressy (1953) yang menyatakan bahwa peluang (kesempatan) yang terjadi belum tentu merupakan kesempatan yang nyata karena semakin sedikit kasus kecurangan terungkap maka semakin besar peluang untuk berbuat curang. Kondisi ini bisa terjadi karena sistem kontrol (pengendalian) yang dibangun tidak efektif yang memungkinkan mahasiswa melakukan kecurangan. Sistem pengendalian yang dapat diterapkan untuk mahasiswa adalah dengan cara menanamkan konsep kejujuran (*honesty*) melalui *whistleblowing* sistem sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap tindakan *academic fraud*. Apabila sistem ini sudah berjalan maka peluang untuk melakukan tindakan *academic fraud* dapat diminimalisasi yang akhirnya tidak ada lagi mahasiswa yang berbuat curang.

3. *Razionalisation*

Rasionalisasi adalah elemen ketiga dari *fraud triangle*. Rasionalisasi merupakan suatu pemahaman yang bersumber dari suatu ide terkait dengan apa yang dilakukan ini merupakan tindakan yang etis sehingga ada asumsi membenaran dalam diri pelaku *academic fraud*. Asumsi membenaran ini terjadi ketika seseorang tidak dapat membuktikan bahwa tindakan tidak etis ini termasuk indikasi tindakan *academic fraud* maka perilaku yang dilakukan bukan merupakan indikasi *academic fraud*. Contoh konkrit yang sering terjadi adalah "Saya hanya meminjam uang", "Saya berhak mendapatkan uang itu karena majikan saya menipu saya." Selain itu, beberapa penipu mengeluarkan tindakan mereka karena "Saya harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya", "Beberapa orang melakukannya mengapa saya juga tidak" (Cressey, 1953). Selain itu ada pernyataan dari

mahasiswa yang menyatakan “Saya harus mencontek karena saya mempunyai kegiatan diluar kampus agar nilai saya tetap bagus dan membahagiakan orang tua”, “Saya harus bertanya jawaban ketika ujian akhir semester agar nilai ujian saya bagus dan IPK saya naik”, Saya harus menyalin pekerjaan rumah teman saya karena beban tugas yang banyak sekali.

Rasionalisasi sulit untuk diprediksi karena alasan mereka melakukan tindakan kecurangan terkadang berdasarkan konsep pemikiran yang berasumsi bahwa tindakan ini bukan termasuk perilaku tidak etis dan bisa dimaafkan (Hooper and Pornelli, 2010). Rasionalisasi dapat diartikan suatu perilaku kecurangan yang dilakukan karena adanya pemikiran pembenaran, hal ini dapat terjadi karena kurangnya integritas dan penalaran moeal (Rae dan Subramanian, 2008). Nilai etika dan perilaku pribadi yang dimiliki juga merupakan faktor penyebab kecurangan terjadi (Kenyon dan Tilton, 2006). Howe dan Malgwi (2006) menjelaskan bahwa penghubung pembenaran dari suatu perilaku curang dapat terjadi karena adanya insentif atau tekanan dan peluang.

Whistleblowing System

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) mendeskripsikan mendefinisikan *Whistleblowing* adalah: “Pelaporan yang dilakukan secara tertutup (rahasia) terkait dengan perbuatan penyelewengan, pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, tidak bermoral yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan, dimana perbuatan ini dilakukan oleh manajemen maupun pemilik yang memiliki kewenangan sehingga tindakan pelanggaran dapat terjadi.” Hoffman and Robert dalam Dimas (2015) *Whistleblowing* diartikan sebagai

pelaporan yang dilakukan oleh karyawan dengan memberikan informasi bahwa ada pelanggaran hukum, penyelewengan, ketidakberesan, kekeliruan terkait dengan mekanisme kerja yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan kerja dan masyarakat.

Sistem pengungkapan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dibangun dengan mekanisme kerja berdasarkan what, who, where, when dan how (5W+1H), yang kemudian ada *follow-up* berupa laporan, selain itu ada penghargaan bagi pelapor (*whistleblower*), sistem ini juga memberikan keamanan bagi pelapor, dan tentunya akan ada *punishment* bagi yang terlapor bisa berupa sanksi. Menurut Mark Zimbelman (2006), sistem *whistleblowing* idealnya dapat dijadikan suatu indikator yang efektif dan efisien dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. *Whistleblowing system* yang efektif harus memenuhi 4 elemen berikut:

a) Anonimitas

Sistem didesain dengan menyamarkan profile pelapor, dengan tujuan agar pelapor tidak memiliki kekhawatiran setelah melakukan proses pelaporan tindakan kecurangan yang terjadi baik di perusahaan, organisasi, perguruan tinggi. Hal ini tentunya akan memeberikan kemudahan dalam proses pengungkapan kecurangan bahkan kejahatan yang terjadi.

b) Independensi

Independensi disini memiliki pengertian bahwa pihak yang bertugas menerima laporan kecurangan dari pelapor memiliki sikap independen tidak memihak pada salah satu pihak, sehingga proses tindak lanjut dilakukan

- berdasarkan keputusan yang bersifat objektif.
- c) Akses yang mudah
Jaringan atau aplikasi merupakan sarana yang harus dimiliki pelapor. Jaringan ini dapat berupa telepon, *e-mail*, sistem *online*, dan *faximile*. Jaringan ini juga dilengkapi *security access* terkait menyamaran profile pelapor.
- d) Tindak lanjut
Pelaporan tindakan tidak etis, penyelewengan, kecurangan, ketidakberesan, kekeliruan yang dilaporkan melalui *whistleblowing system* selanjutnya akan dilakukan proses tindak lanjut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan tujuan penentuan apakah pelaporan ini perlu penyelidikan atau tidak. Manfaat adanya tindak lanjut ini membuat pelapor menjadi lebih aktif dan peduli melaporkan indikasi budaya tidak etis yang terjadi.

Academic Fraud

Kecurangan Akademik merupakan tindakan yang disengaja dilakukan untuk memperoleh prestasi dibidang akademik dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Tindakan *academic fraud* yang biasa ditemui di lingkungan akademisi adalah plagiarisme; fabrikasi atau pemalsuan bukti, data, atau hasil; pemaksaan bukti atau data yang relevan; penyimpangan sumber-sumber yang keliru; pencurian ide; atau penyimpangan yang disengaja dari karya penelitian atau data orang lain. Kecurangan akademik bisa disebabkan karena dari faktor internal dan eksternal dari diri mahasiswa. Menurut Hendricks (2004) faktor yang menyebabkan adanya kecurangan akademis, yaitu:

1. Faktor individual.

Faktor individu (faktor internal) yang merupakan bagian dari pribadi

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa elemen yang dapat dijadikan proksi dalam menilai indikasi kecurangan yang terjadi, yaitu

a. Usia.

Usia akademisi yang relatif masih muda memiliki kecenderungan untuk berbuat curang karena rasa kekhawatiran yang dimiliki belum sebesar usia akademisi yang berada di semester atas. Kondisi ini terjadi karena pola pemikiran yang terbentuk sudah mengarahkan kepada efek jangka panjang akibat dari berbuat curang.

b. Jenis kelamin.

Kecenderungan perilaku berbuat curang indikasinya lebih besar dilakukan oleh akademisi berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan memiliki kecenderungan patuh terhadap peraturan yang berlaku menurut teori sosialisasi peran gender.

c. Prestasi akademis.

Prestasi akademis merupakan elemen yang dapat mempengaruhi seorang akademis untuk berbuat curang. Tujuan dari berbuat curang ini karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, indeks perestasi (Ipk) yang tinggi, lulus tepat waktu dan dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Tindakan yang dilakukan oleh akademisi ini cenderung konsisten karena memiliki tujuan yang jelas sehingga kemungkinan perbuatan curang ini dilakukan oleh akademisi yang memiliki nilai indeks prestasi rendah sedangkan akademisi yang memiliki nilai indeks perstasi tinggi cenderung tidak melakukan tindakan ini karena tidak ingin mengambil resiko.

d. Pendidikan orangtua.

Pendidikan orangtua dapat

mempengaruhi pola berfikir akademisi sehingga ada anggapan bahwa kesiapan akademisi tergantung dari pembangunan karakter orang tua terhadap anaknya. Pembangunan karakter ini berupa komitmen berbuat jujur sehingga ada kesiapan mental anak dalam menjalani perkuliahan dengan tidak melakukan tindakan kecurangan akademik.

e. Aktivitas ekstrakurikuler.

Kecurangan akademik dilakukan oleh akademisi (mahasiswa) dikarenakan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas ekstrakurikuler. Hal ini terjadi karena komitmen belajar menjadi terbagi sehingga skala prioritas yang dibuat menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan mahasiswa terindikasi melakukan *academic fraud*. Contoh; aktivitas ekstrakurikuler yang telah diteliti secara luas yaitu mahasiswa yang mengikuti ekstrakurikuler di dalam perkumpulan mahasiswa dan kegiatan olahraga.

2. Faktor kepribadian mahasiswa.

Kepribadian mahasiswa yang dapat mengindikasikan adanya perilaku kecurangan akademik adalah

a. Moralitas.

Moralitas merupakan indikator utama yang bisa dijadikan ukuran penyebab mahasiswa melakukan tindakan kecurangan. Idealnya tingkat moralitas yang tinggi akan mengurangi indikasi mahasiswa berbuat curang dan sebaliknya apabila tingkat moralitas yang dimiliki mahasiswa rendah maka akan ada indikasi tindakan kecurangan. Tingkat moralitas ini diukur berdasarkan kejujuran dan religiusitas yang dimiliki mahasiswa.

b. Variabel yang berkaitan dengan pencapaian akademis.

Pencapaian akademisi dapat

terrealisasi ketika ada motivasi dalam diri mahasiswa, kepribadian dan ekspektasi untuk meraih kesuksesan. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka tiga komponen yang dapat mendorong pencapaian akademis justru menjadi penyebab adanya kecurangan akademik, Artinya semakin mahasiswa memiliki motivasi untuk berprestasi maka mahasiswa cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan akademik. Mahasiswa yang memiliki kepribadian yang etis dan ekspektasi yang baik akan pencapaian akademis akan cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan akademik.

c. Impulsivitas, afektivitas, dan variabel kepribadian yang lain.

Dorongan yang didasarkan pada keinginan secara sadar atau tidak sadar (impulsivitas) serta kekuatan ego dapat berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan tindakan kecurangan akademik. Mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan tinggi maka ada indikasi melakukan tindakan kecurangan akademik.

3. Faktor kontekstual

a. Keanggotaan perkumpulan mahasiswa.

Keanggotaan perkumpulan mahasiswa bisa menjadikan adanya sisi negatif karena ada aktivitas yang dapat mendorong mahasiswa untuk berbuat curang. Aktivitas ini seperti, penyediaan catatan ujian yang lama, tugas-tugas, tugas laboratorium dan tugas akademis lain mudah untuk dicari dan didapatkan.

b. Perilaku teman sebaya.

Perilaku teman sebaya mempunyai pengaruh untuk melakukan tindakan kecurangan akademik. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) dari Edwin Sutherland dan teori hubungan perbedaan (*Differential Association*

Theory) menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk dapat dipengaruhi lingkungan dan budaya dimana seseorang berinteraksi, apabila lingkungan tersebut mempunyai budaya yang tidak etis maka perilaku tersebut dapat melekat pada individu yang berada di lingkungan tersebut.

c. Penolakan teman sebaya terhadap perilaku curang.

Penolakan teman sebaya terhadap perilaku curang merupakan mekanisme yang dapat dilakukan untuk terhindar dari perbuatan kecurangan akademik.

4. Faktor situasional

a. Belajar terlalu banyak, kompetisi dan ukuran kelas.

Mahasiswa yang mengambil sks terlalu banyak dengan tidak melihat kemampuan yang dimiliki dan menganggap teman adalah kompetitor yang harus dikalahkan maka ada kemungkinan melakukan tindakan kecurangan dibandingkan mahasiswa yang mengambil sks disesuaikan dengan kemampuannya dan menganggap teman bukan kompetitor akan cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan. Ukuran kelas juga dapat dijadikan alasan mahasiswa dapat melakukan tindakan kecurangan, karena ukuran kelas dengan jumlah mahasiswa yang terlalu banyak memiliki potensi monitoring yang rendah terhadap aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Semakin ukuran kelas besar dengan jumlah mahasiswa banyak maka memiliki hubungan positif terhadap tindakan kecurangan akademik.

b. Lingkungan ujian.

Lingkungan ujian merupakan kondisi yang menyebabkan mahasiswa sering melakukan tindakan kecurangan akademik,

karena ada persepsi resiko yang didapat lebih kecil tergantung dari pengawas ujian. Ketika mendapatkan pengawas ujian yang longgar maka resiko mencotek menjadi tidak beresiko dan sebaliknya.

Matindas (2010) memaparkan bahwa kecurangan akademik terjadi karena ada keterkaitan antara unsur yang bersifat internal (pribadi) dan bersifat eksternal (lingkungan). Alfindra Primaldi (Matindas, 2010) menuliskan bahwa penyebab faktor antara lain *academic self-efficacy*, indeks prestasi akademik, motivasi dalam bekerja, *self-esteem*, kemampuan atau kompetensi motivasi akademik (*need for approval belief*), sikap (*attitude*), tingkat pendidikan metode belajar (*study skill*), dan moralitas, sedangkan yang bersifat eksternal antara lain monitoring yang dilakukan oleh dosen pengajar, implementasi tata tertib, respon pihak birokrat terhadap kecurangan, tingkah laku siswa lain serta asal negara pelaku kecurangan.

Unsur-unsur yang ada pada faktor internal dan eksternal merupakan unsur yang memiliki saling berhubungan. Misalnya harga diri mahasiswa berhubungan dengan kompetensi akademik dan kompetensi akademik berkaitan dengan metode belajar serta *self-efficacy*. Matindas (2010) menjelaskan faktor penyebab adanya motivasi melakukan kecurangan akademik, yaitu

1. Ketidaktahuan seseorang bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku tidak etis, penyimpang dari tata tertib yang telah ditentukan.
2. Adanya keyakinan bahwa apa yang dilakukan tidak akan diketahui pihak lain meskipun

- mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan.
3. Adanya asumsi terkait dengan
 - a. Mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Tahu hal tersebut tidak boleh dilakukan
 - b. Adanya ketidakpercayaan terhadap apa yang diperbuat tidak dapat diketahui pihak lain, namun tidak dapat diketahui probabilitas lain yang dapat dicapai seperti lulus tepat waktu dengan nilai yang baik
 4. Ketidakpercayaan terhadap pemberian punishment ketika melakukan pelanggaran atau tindakan kecurangan akademik.
 5. Hilangnya rasa malu dalam diri pelaku ketika perbuatan tidak etis, penyelewengan dan kecurangan akademik diketahui pihak lain.

Colby (2006) menjelaskan bahwa di Arizona State University jenis kecurangan akademik dibagi menjadi lima jenis yaitu:

1. Plagiat
 - a. Menuliskan kalimat, kata dan gagasan pihak lain tanpa menuliskan sumber tulisan.
 - b. Penggunaan tanda kutipan tidak digunakan sehingga hasil dari laporan yang ditulis yang bersumber dari internet, jurnal, majalah, koran mengandung unsur plagiat..
2. Data fiktif, contoh data penelitian bersumber dari data palsu.
3. Penggandaan tugas, yakni mengumpulkan dua proposal penelitian dengan konsep yang sama akan tetapi dikumpulkan

- pada kelas yang berbeda dengan tidak seizin dosen/guru.
4. Menyontek pada saat ujian
 - a. Meminjam dan menulis kembali jawaban orang lain pada kertas lembar jawaban
 - b. Memperbanyak lembar soal dan diberikan kepada orang lain.
 - c. Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendapatkan soal ujian yang kemudian dibagikan kepada yang meminta.
 5. Kerjasama yang salah
 - a. Bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas individual
 - b. Tidak melakukan tugasnya ketika bekerja dengan sebuah tim.

Lambert, Hogan dan Barton, (2003) menjelaskan hal yang sama dengan Colby bahwa kecurangan akademik terjadi dikarenakan empat unsur, yaitu (1) menyalin materi yang tidak valid selama ujian, (2) informasi baik itu berupa data atau sumber bacaan secara illegal, (3) plagiat, (4) kerjasama yang memperbolehkan temannya menyalin hasil pekerjaan, memberikan kumpulan soal-soal yang sudah diujikan, mengingat soal ujian kemudian membocorkannya. Anitsal, Anitsal, dan Elmore (2009) menjelaskan bahwa ada dua jenis kecurangan akademik yaitu kecurangan akademik pasif dan kecurangan akademik aktif. Perilaku kecurangan akademik pasif meliputi ada perbuatan menyontek ketika ujian tapi cenderung membiarkannya, memberikan informasi tentang soal ujian kepada orang yang belum ujian di mata pelajaran yang sama. Perilaku kecurangan akademik aktif antara lain tindakan untuk menyuruh orang lain mengambil soal ujian, menyalin jawaban dan

mengunakan telpon untuk mengirim dan meminta jawaban.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan responden pejabat struktural setingkat jurusan yaitu Kaprodi (Kepala Program Studi), Dosen pengampu mata kuliah pengauditan dan etika profesi dan bisnis syariah. Alasan peneliti menggunakan responden tersebut adalah mahasiswa tersebut telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan salah satu output lulusan yaitu menjadi seorang auditor atau akuntan yang mengedepankan profesionalisme, integritas, objektivitas, transparansi dan telah mengetahui peranan dari *whistleblowing* sistem yang sudah dijelaskan di mata kuliah etika profesi dan bisnis syariah, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan *whistleblowing* sistem. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan alat analisis berupa narasi.

Mekanisme pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Lapangan Model *Miles and Huberman*. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data displays*, dan *conclusion drawing/ verification*. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2007).

4. Hasil dan Pembahasan

Whistleblowing sistem merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk mendeteksi fraud akademik dikalangan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan generasi ini merupakan generasi yang melawan tindak kecurangan dengan berani menjadi seorang pelapor (*whistleblower*). Keberanian ini bisa terwujud ketika mahasiswa sudah memiliki budaya untuk bertindak jujur sewaktu menjadi mahasiswa dan mampu menjadi *self control* bagi diri sendiri dan lingkungan. Kecurangan yang sering terjadi bisa disebabkan oleh dalam diri mahasiswa tersebut dan bisa disebabkan dari terdiri dari lima yaitu: plagiarisme, data fiktif, memperbanyak tugas, menyontek saat ujian, dan pathnership (kerjasama) yang keliru. Kelima kategori ini dapat dikurangi dengan menerapkan *whistleblowing* system di lingkungan kampus dengan melibatkan seluruh elemen yang ada dikampus.

Pengertian *Whistleblowing* dikalangan Universitas

Hoffman and Robert dalam Dimas (2015) *Whistleblowing* memiliki pengertian pernyataan yang dibuat oleh karyawan terkait dengan informasi yang berisi kekeliruan, ketidakberesan, pelanggaran hukum, korupsi, kecurangan akademik, pelanggaran tata tertib yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan tempat kerja. Apabila dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Universitas maka tentunya pengungkapan kecurangan

yang dilakukan oleh mahasiswa ini memberikan makna adanya pelanggaran kode etik seorang mahasiswa sehingga dapat mengakibatkan budaya yang dibangun merupakan budaya yang tidak baik. Hal ini tentunya akan berimbas pada output ketika mahasiswa sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan selain itu kepercayaan publik kepada Universitas akan berkurang. Oleh karena itu pandangan mahasiswa, dosen dan kaprodi terkait dengan pengertian *whistleblowing* menjadi sangat penting untuk dijadikan tolak ukur apakah mahasiswa, dosen, dan kaprodi mengetahui pengertian *whistleblowing*. Pernyataan tersebut sama dengan yang dijelaskan oleh informan 1 dalam wawancara:

“menunjukkan bahwa *whistleblowing* merupakan sebuah pelaporan yang dilakukan untuk mengurangi kecurangan, yang dalam prakteknya pelaporan ini telah banyak dilakukan di perusahaan swasta ataupun pemerintahan. Jenis pelaporan ini belum banyak diaplikasikan dikalangan Universitas dikarenakan ada beberapa kondisi kecurangan akademik yang bisa dideteksi oleh dosen kemudian dilaporkan kaprodi. Namun apabila dilihat dari karakteristik dosen tentunya tidak semua dosen memiliki cukup waktu untuk mendeteksi kecurangan akademik dikarenakan intensitas setiap dosen berbeda-beda. Oleh karena itu akan lebih baik apabila *Whistleblowing* ini bisa diterapkan dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan pejabat struktural agar kecurangan yang terjadi bisa diungkap dan ditindak lanjuti. Selain itu apabila mahasiswa menjadi *whistleblower* maka akan melatih mahasiswa memiliki keberanian sikap untuk melaporkan tindakan yang tidak beretika.

Sedangkan Informan 2 dalam wawancara menyatakan bahwa:

“*Whistleblowing* merupakan pengungkapan kecurangan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan dapat membantu dosen untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi didalam kelas karena ada *whistleblower*. *Whistleblower* diperlukan karena ada beberapa kondisi diluar jangkauan dosen untuk mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti apabila tugas dikerjakan dengan menggunakan sistem meringkas maka dosen mengalami kesulitan untuk mendeteksi apakah hasil ringkasan tersebut merupakan hasil kerja sendiri atau hasil kompilasi dari ringkasan beberapa mahasiswa yang kemudian diolah kembali.

Informan yang ke 3, 4 dan 5 menambahkan:

“*Whistleblowing* bisa diartikan sebagai pengaduan terkait dengan academic fraud yang terjadi di perguruan tinggi dengan mahasiswa sebagai pelaku apabila dilaporkan oleh mahasiswa tentunya akan memberikan nilai positif, karena tindak kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa yang belum bisa terdeteksi menjadi bisa terdeteksi dengan adanya pelaporan.

Manfaat dari *whistleblowing* sistem :

Manfaat dari *whistleblowing* sistem menurut Tuanakotta (2010), yaitu :

1. Adanya wadah untuk menyalurkan informasi yang penting dan mendesak bagi perusahaan yang kemudian informasi tersebut ditangani secara aman,
2. Prosentase Pelanggaran mengalami penurunan karena adanya peningkatan aduan dan kepercayaan terhadap sistem pengaduan yang

- dibuat secara efektif,
3. Adanya sistem deteksi dini (*early warning system*) terkait probabilitas persitiwa yang mengarah kepada pelanggaran,
 4. Adanya peluang penanganan pelanggaran yang dilakukan secara internal, sebelum pelanggaran tersebut diketahui masyarakat (pihak eksternal),
 5. Menurunkan resiko yang terjadi dalam suatu organisasi yang diakibatkan dari pelanggaran Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran yang bersumber dari keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi,
 6. Sistem ini dapat menangani pelanggaran secara efisien sehingga biaya yang dikeluarkan sedikit,
 7. Pihak pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dan publik semakin percaya dengan perusahaan sehingga reputasi perusahaan mengalami peningkatan,
 8. Sistem ini mempunyai tujuan positif yaitu adanya masukan yang ditunjukkan untuk perusahaan terkait dengan proses kerja dengan memberikan kritikan terkait kekurangan pengendalian internal, sekaligus memperbaiki tindakan pelanggaran tersebut.

Menurut Amri (2008) tindakan yang dapat diasumsikan sebagai pelanggaran adalah tindakan yang melawan hukum seperti korupsi, dan kecurangan. Pendapat Amir (2008) ini berarti bisa diartikan kecurangan akademik merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh pelapor dengan itikad baik.

Kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa tidak dilaporkan maka akan menimbulkan akibat negatif, Mulyawati, dkk. (2010)

menjelaskan bahwa kecurangan akademik memiliki pengaruh terhadap:

1. Prosentase produktivitas pendidikan di Indonesia mengalami penurunan,
2. Sistem belajar mengajar yang diterapkan di sekolah hingga perguruan tinggi belum dapat menciptakan generasi penerus yang sesuai dengan harapan.

Anitsal, Anitsal, dan Elmore (2009) menguatkan penjelasan Mulyawati terkait dengan adanya hubungan antara kecurangan akademik dengan perilaku tidak etis. Beberapa penjelasan yang berasal dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa perilaku tidak etis yang berupa kecurangan akademik ini disebabkan budaya moral mahasiswa. Budaya moral mahasiswa yang tidak etis ini dapat menyebabkan lulusan Perguruan Tinggi memiliki jiwa tidak jujur dan berpengaruh ketika berada di lingkungan kantor. Kondisi ini yang menjadikan peneliti menanyakan kepada mahasiswa bagaimana manfaat yang diperoleh apabila *whistleblowing* sistem diterapkan dan bagaimana dengan kecurangan akademik yang terjadi saat ini. Berikut hasil wawancara dari informan 1:

“Manfaat dari *whistleblowing* sistem mampu membuat situasi Universitas (Fakultas) menjadi lebih tertib, nyaman, mahasiswa mematuhi kode etik yang sudah dibuat oleh Universitas (Fakultas), sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih berkualitas, adanya peningkatan kepatuhan mahasiswa dengan tata tertib yang berlaku di Universitas (Fakultas) sehingga masyarakat menjadi lebih percaya. meningkatkan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan yang diberlakukan di Universitas (Fakultas) dan kepercayaan masyarakat meningkat.”

Informan ke 2 menjelaskan manfaat *whistleblowing* sistem lebih detail yaitu:

“Membantu dosen dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan mahasiswa karena ada beberapa tugas dosen yang sifatnya masih manual belum bisa menggunakan check turnitin seperti tugas meringkas dengan tulis tangan, tugas perhitungan yang jawabannya dilakukan dengan tulis tangan. Selain itu sistem ini dapat membuat mahasiswa tidak meremehkan tugas yang diberikan oleh dosen meskipun tugas yang dibuat hanya berupa membuat ringkasan materi. Oleh karena itu sistem ini bisa memberikan manfaat yaitu membuat mahasiswa berbuat jujur, dan berani mengungkap kebenaran apabila mengetahui temannya melakukan kecurangan akademik.”

Informan 3,4,dan 5 menambahkan jawaban menjadi lebih lengkap yaitu:

“Mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen karena apabila mereka berbuat curang maka siapapun dapat dengan mudah melaporkan perbuatan tersebut karena yang melaporkan akan disamakan namanya atau diberikan jaminan keamanan. Tentunya manfaat lainnya adalah mahasiswa menjadi jujur dan tidak melakukan tindakan kecurangan karena institusi memiliki sistem yang fair mengenai sistem penilaian karena mahasiswa yang melakukan menyontek akan mendapatkan penilaian sesuai dengan apa yang diperbuat, sebab adanya pelaporan yang dilakukan mahasiswa yang tidak melakukan perbuatan menyontek, plagiarisme dan memalsukan data.”

Pemahaman *Whistleblowing System* dikalangan Institusi:

Matindas (2010), Lambert, Hogan dan Barton, (2003) memberikan penjelasan yang sama dengan Colby bahwa ada empat kategori yang termasuk kecurangan akademik. (1) menyalin dengan sumber yang tidak diperbolehkan selama ujian, (2) memakai sumber, informasi dan data yang tidak asli, (3) plagiat, (4) memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menyalin pekerjaan yang sudah dibuat, sengaja membagikan soal-soal yang tidak boleh dibagi dengan mahasiswa lain (kelas lain), sengaja memberitahu pertanyaan yang telah diujikan dalam ujian. Anitsal, Anitsal, dan Elmore (2009) menjelaskan kecurangan akademik terdiri dari kecurangan akademik pasif dan kecurangan akademik aktif. Perbuatan yang termasuk kecurangan akademik pasif antara lain membiarkan orang lain berbuat curang, memberitahu soal ujian yang telah diujikan kepada mahasiswa lain. Perbuatan kecurangan akademik aktif antara lain tindakan yang berupa menyuruh orang lain mengambil soal ujian, mencontek jawaban, dan memakai handphone untuk menyalin jawaban dengan cara mengirimkan pesan.

Kondisi diatas memberikan gambaran bahwa tindakan kecurangan dikalangan mahasiswa bisa terjadi dan kecurangan yang dilakukan bisa dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu *whistleblowing* sistem perlu diaplikasikan di institusi untuk mendeteksi kecurangan akademik. *Whistleblowing* sistem ini memerlukan *whistleblower* agar sistem yang dirancang bisa berjalan. Rafik (2008) menjelaskan pada umumnya siswa atau mahasiswa memerlukan *whistleblowing* sistem untuk membedah peristiwa terkait kecurangan akademik,

walaupun ada keengganan mahasiswa menjadi *whistleblower*. Kondisi ini terjadi karena adanya resiko yang akan diterima bagi *whistleblower* seperti pembalasan dan kesulitan mencari pekerjaan. Resiko yang dialami *whistleblower* dapat berkurang apabila institusi membuat suatu peraturan yang di setujui oleh dekan terkait dengan perlindungan saksi atau korban yang berdasarkan UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan perlindungan yang dibuat dapat memperjelas pemahaman mahasiswa terkait dengan *whistleblowing* sistem. Pernyataan ini sama dengan informan 1 dalam wawancara:

“Menjelaskan bahwa *whistleblowing* system dapat mengurangi kecurangan akademik dikalangan mahasiswa karena ada dua kondisi yang bisa dijadikan alasan dalam melakukan tindakan kecurangan akademik. Kondisi yang pertama merupakan kondisi dimana kecurangan dilakukan secara partial sehingga dalam proses pendeteksiannya tidak begitu mengalami kesulitan karena sifat kerugiannya bersifat individu. Kondisi yang kedua ada kecurangan akademik yang dilakukan dengan melibatkan pihak lain seperti memalsukan data penelitian, mengganti nilai dalam kartu hasil studi (KHS). Tentunya kondisi ini dapat merugikan Universitas sehingga pengungkapannya akan lebih efektif dan independen dengan menggunakan *whistleblowing* sistem dan melibatkan mahasiswa sebagai pelapor karena selama ini kecurangan akademik sulit terdeteksi disebabkan adanya rasa takut dari dalam diri mahasiswa untuk mengungkapkannya.”

Pernyataan Informan 2 dalam

wawancara:

“*Whistleblowing* sistem dapat dijadikan pilihan sistem yang bisa diimplementasikan dengan tujuan sebagai alternatif sistem yang dapat diterapkan untuk membantu dosen dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sistem ini memberikan alternatif dalam menyelesaikan kecurangan yang terjadi, karena mahasiswa memiliki keberanian untuk melapor sehingga perbedaan karakter antar mahasiswa dapat diatasi dengan penerapan sistem ini, karena pihak pelapor akan diberikan tasa aman sehingga tidak ada tekanan, ancaman dan rasa tidak aman.”

Informan yang ke 3 mengungkapkan:

“Adanya keberanian dalam diri mahasiswa untuk melaporkan tindakan kecurangan meskipun kecurangan dilakukan oleh teman dekatnya, karena sistem ini memiliki keamanan. Keamanan sistem ini diperkuat dengan adanya surat keputusan (SK) yang berisi tentang tata cara melaporkan tindak kecurangan akademik”

Informan yang ke 4 menambahkan

“Perbuatan kecurangan akademik dapat dideteksi dengan *whistleblowing* sistem sehingga prosentase kecurangan akademik mengalami penurunan..”

Informan yang ke 5 melengkapi jawaban informan sebelumnya, yaitu:

”*Whistleblowing* merupakan media yang ditujukan untuk mahasiswa dan sistem kendali yang berfungsi menurunkan kecurangan akademik serta memberikan pengaruh berupa lulusan dari institusi mendapatkan penilaian serta pengakuan yang baik sehingga memperoleh award dari masyarakat. Penghargaan ini diberikan karena adanya penguatan karakter kejujuran untuk tidak

berbuat curang”.

Pernyataan-pernyataan diatas menjelaskan bahwa *whistleblowing* sistem ini apabila diterapkan bisa mempunyai *feedback* yang baik. Feedback ini terjadi karena adanya trust dari masyarakat karena secara otomatis masyarakat disini akan percaya bahwa institusi ini tidak hanya memberi jaminan anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pekerjaan setelah lulus akan tetapi mahasiswa juga memiliki akhlak yang baik.

Namun pernyataan ini harus didukung dengan budaya positif untuk mengurangi perbuatan kecurangan akademik, seperti yang dijelaskan Akmal Sulistomo (2012) terkait dengan persepsi tentang norma subyektif, sikap, dan persepsi tentang kontrol perilaku berpengaruh signifikan positif terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan.

Hal ini sejalan dengan Hwang dan rekan (2008) yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat dari *culture* pada niat akuntan dan auditor professional saat ini dan dimasa yang akan datang untuk menjadi *whistleblower* pada sosial budaya cina dengan hasil bahwa moralitas secara umum adalah faktor terpenting untuk mendorong *whistleblowing*, dengan menuruti aturan organisasi mereka.

Tahapan Proses Whistleblowing System

Sistem pengungkapan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dibangun dengan mekanisme kerja berdasarkan what, who, where, when dan how (5W+1H), yang kemudian ada *follow-up* berupa laporan, selain itu ada penghargaan bagi pelapor (*whistleblower*), sistem ini juga memberikan keamanan bagi pelapor, dan tentunya akan ada *punishment* bagi

yang terlapor bisa berupa sanksi.

Menurut Mark Zimbelman (2006), sistem *whistleblowing* idealnya dapat dijadikan suatu indikator yang efektif dan efisien dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan dengan kriteria memenuhi empat elemen yaitu anominitas (kerahasiaan pelapor), independensi, akses yang mudah, tindak lanjut. Berikut beberapa pendapat mahasiswa terkait dengan tahapan tersebut:

Informan 1 memiliki karakteristik jawaban yang sama:

“Sistem *whistleblowing* yang diimplementasikan sebaiknya memiliki fitur terkait peraturan pelapor, karena fitur ini dapat memberikan rasa aman bagi pelapor. Sistem ini dalam proses kerja mempunyai alur yang jelas, seperti pihak yang dapat mengakses sistem. Tujuannya agar pengaduan kecurangan dapat diproses secara independen dan aman. Konektivitas jaringan internet stabil sehingga mahasiswa ketika akan melakukan proses pelaporan tidak terkendala. Terakhir tindak lanjut dari institusi menjadi point penting setelah proses pengaduan dilakukan”

Informan 2 menjelaskan perlunya pihak tenaga kependidikan dalam proses kerja sistem ini

“Sistem *whistleblowing* yang diterapkan harus memiliki tahapan proses kerja dengan melibatkan karyawan tidak hanya dosen dan pimpinan karena karyawan disini juga terlibat dalam pengawasan ketika ujian dan pembuatan KHS sehingga apabila karyawan dilibatkan maka pihak yang menjadi pelapor akan lebih kompleks karena kecurangan mahasiswa yang terjadi pada saat ini bisa melibatkan pihak eksternal.”

Informan 3, 4 dan 5 menjelaskan terkait

luaran dari sistem ini

“Sistem *whistleblowing* yang sudah diimplementasikan idealnya memiliki alur kerja yang sistematis apalagi sistem ini merupakan sistem yang masih baru sehingga dibutuhkan adaptasi dalam mengoperasionalkan. Jadi ketika mahasiswa melaporkan kecurangan akademik laporan tersebut ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi bagi pembuat kecurangan apabila terbukti bersalah.”

Tahapan sistem *whistleblowing* ini dari adanya laporan, memproses laporan dengan memanggil pihak yang berbuat kecurangan, kemudian mengkomunikasikan kepada pelapor hasil investigasi yang telah dilakukan dengan yang berbuat kecurangan dan pihak kampus memberikan tindak lanjut sesuai hasil temuannya, maka kesimpulan yang didapat adalah:

“Evaluasi merupakan hal yang penting dalam sistem *whistleblowing* karena baik atau tidaknya suatu sistem dapat diketahui dari setiap evaluasi yang dilakukan. Selain itu evaluasi ini mempunyai tujuan apakah perlu adanya updating sistem sehingga tujuan pembentukan sistem ini dapat konsisten diterapkan, yaitu memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi kecurangan akademik.”

5. Simpulan

Whistleblowing sistem merupakan sistem yang mempunyai sisi positif dikarenakan dapat mengurangi kecurangan dikalangan mahasiswa, mutu pembelajaran menjadi bagus sehingga menghasilkan luaran yang bagus serta membuat mahasiswa menjadi patuh terhadap peraturan yang berlaku di kampus. Tanggapan mahasiswa mengenai sistem *whistleblowing* apabila diterapkan dikampus: (1) mahasiswa dapat dengan

leluasa melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi di kampus, (2) mahasiswa dapat membantu proses sosialisasi akan pentingnya *whistleblowing* sistem, dan (3) sistem *whistleblowing* apabila diterapkan dapat membantu dalam proses pemantauan sampai dimana proses pelaporan atas tindak kecurangan yang terjadi.

Sedangkan tanggapan dari pejabat di level program dan dosen menyatakan bahwa sistem *whistleblowing* membantu proses pengungkapan kecurangan akademik, karena selama ini kecurangan akademik sulit terdeteksi disebabkan adanya rasa takut dari dalam diri mahasiswa untuk mengungkapkannya. Tanggapan yang dinyatakan ini sesuai dengan tahapan sistem kerja sistem *whistleblowing*, yaitu terdiri dari empat elemen kriteria yaitu anominitas, independensi, akses yang mudah, tindak lanjut.

Oleh karena itu diharapkan apabila penerapan *whistleblowing* sistem ini mampu mengurangi kecurangan akademik dan menciptakan lulusan yang beretika dan berani untuk mengungkap kecurangan. Kecurangan akademik yang terjadi dikalangan mahasiswa menurut

Matindas (2010), Lambert, Hogan dan Barton, (2003) memberikan penjelasan yang sama dengan Colby bahwa ada empat kategori yang termasuk kecurangan akademik. (1) menyalin dengan sumber yang tidak diperbolehkan selama ujian, (2) memakai sumber, informasi dan data yang tidak asli, (3) plagiat, (4) memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menyalin pekerjaan yang sudah dibuat, sengaja membagikan soal-soal yang tidak boleh dibagi dengan mahasiswa lain (kelas lain), sengaja memberitahu pertanyaan yang telah diujikan dalam ujian.

Anitsal, Anitsal, dan Elmore (2009) menjelaskan kecurangan akademik terdiri dari kecurangan akademik pasif dan kecurangan akademik aktif. Kondisi ini merupakan cerminan kecurangan akademik yang sering ditemui dilingkungan mahasiswa.

Kecurangan ini dapat dicegah dengan penerapan whistleblowing sistem, karena sistem ini memiliki manfaat seperti situasi kampus menjadi lebih nyaman dan kondusif, sistem pembelajaran menjadi lebih berkualitas, kepatuhan mahasiswa terhadap tata tertib meningkat, dan dapat menghasilkan lulusan yang jujur. Sistem *whistleblowing* ini dapat berjalan ketika ada sinergisme antara mahasiswa, dosen dan kaprodi terkait pemrosesan pengaduan kecurangan akademi sehingga sistem yang dibangun dapat berfungsi dengan baik. Sistem *whistleblowing* ini mempunyai tahapan sistem kerja dimana dalam tahapannya tersebut memenuhi empat elemen kriteria yaitu anominitas (kerahasiaan pelapor), independensi, akses yang mudah, tindak lanjut.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan seperti lokasi penelitian hanya satu fakultas saja, sehingga generalisasi masih lemah. Penelitian selanjutnya perlu menambah objek penelitian tidak hanya satu fakultas saja, dan membandingkan budaya fakultas yang sosial humoniora dengan fakultas sastra dan eksak agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan lebih luas. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik wawancara yang hasilnya tidak bisa dilihat secara prosentase, penelitian yang akan datang tidak hanya wawancara akan tetapi menambah dengan kuesioner. Terakhir penelitian ini tidak melibatkan karyawan, dekan, dan rektor sebagai responden sebaiknya penelitian yang

akan datang melibatkan ketiga responden tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris, dkk., (2011). Memahami Whistleblower. Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Cetakan 1.
- Abdullahi, R. and Mansor, N. (2015b). Forensic Accounting and Fraud Risk Factors: The Influence of Fraud Diamond Theory. *The American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*. 1(5):186-192.
- Akmal Sulistomo. (2012). Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Pengungkapan Kecurangan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Alexander Zulkarnaen, (2013). Whistleblower. *Majalah Auditoria Pembangun Pengawas Berkelanjutan* Vol. No. 33 Edisi Januari-Maret
- Alhadza, A. (2001) . Masalah menyontek (Cheating) di dunia pendidikan.(Online) (<http://www.depdiknas.go.id>)
- Anderman Eric M, Murdock TameraB.(2006). Psychology of Academic Cheating, London: Elsevier
- Anitsal, I., Anitsal, M.M., & Elmore, R. (2009). Academic dishonesty and intention to cheat: A model on active versus passive academic dishonesty as perceived by business student. *Academic of Educational Leadership Journal*,13 (2): 17-26
- Antaraneews.com.24 Maret 2010. Ada 472 kasus ujian nasional,diunduh dari <https://www.antaraneews.com/berita/179311/ada-472-laporan-kasus-ujian-nasional-pada-tanggal-14-Januari-2018>
- Bouville, Mathieu. (2008). Whistleblowing and morality.

- Journal of Business Ethics*, Vol. 81 Colby, B. (2006). *Cheating; What is it* (Online), (<http://clas.asu.edu/files/AI%20Flier.pdf>.)
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300
- Crismastuti, A.A. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik Mahasiswa*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata
- Decker, Wayne and Calo, Thomas. (2007). Observers Impressions of Unethical Persons and Whistleblower. *Journal of Business Ethics*, Vol. 76, pp. 309-318
- Elias, Rafik. (2008). Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship To Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23, No.3.
- Fajar Arista, (2015). Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa. *Paradigma*. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2015
- Grubb, M., & Neuhoff, K. (Editor). (2006). *Emissions trading and competitiveness: Allocations, incentives industrial competitiveness under the EU emissions trading scheme*. London: Earthscan.
- Gundlach et al. (2003). The Decision to Blow The Whistle : A Social Information Processing Framework. *Academy of Management Review*, Vol. 28, No. 1.
- Hidayati, (2014). Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Whistleblowing. *Skripsi Program Sarjana Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*
- Hooper, M. J., & Pornelli, C. M. (2010). Detering and detecting financial fraud: A platform for action. [http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/detering-and-detecting-financial-reporting-fraud-a-platform-for-action.pdf?](http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/detering-and-detecting-financial-reporting-fraud-a-platform-for-action.pdf) Retrieved on 20 December 2017
- Hwang, Dennis., Blair Staley., Ying Te Chen., Jyh-Shan Lan. (2008). Confucian Culture and Whistleblowing By Professional Accountants: An Exploratory Study. *Managerial Auditing Journal*, Vol.23, No.5
- Irawati, I. (2008). Budaya menyontek di kalangan pelajar. (Online) (<http://kabarindonesia.com/berita.php>.)
- Kenyon, W. and Tilton, P. D. (2006). Potential red flags and fraud detection techniques: A Guide to Forensic Accounting Investigation, First Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey
- Kelly, P. and Hartley, C. A. (2010). Casino gambling and workplace fraud: a cautionary tale for managers. *Management Research Review*, Vol. 33, No. 3, 224-239
- Kennett, Danny et al. (2010). Accounting Students Intent to Blow the whistle on Corporate Fraudulent Financial Reporting : An Experiment. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 14
- KNKG, <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-SystemWBS.pdf>. Di Akses tanggal 15 Mei 2017
- Kompas.com. 9 Februari 2010. Profesor HI Unpar Diduga Lakukan Plagiat. <http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/09/17044541/>. Diakses

- tanggal 14 Januari 2018
- Kurniawan, (2011). Perilaku Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Psikologi UNNES. *Skripsi Jurusan Psikolog Universitas Negeri Semarang.*
- Lambert, E.G., Hogan, N.L., & Barton, S.M. (2003). Collegiate academic dishonesty revisited: what have they done, how often have they done it, who does it, and why did they do it. *Electronic Journal of Sociology* (Online), (http://www.sociology.org/content/vol7.4/lambert_etal.html.)
- Liyanarachchi et al. (2009). The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing : New Zealand Evidence. *Journal of Business Ethics*, Vol. 89
- LPSK. (2011). Memahami Whistleblower. Jakarta: LPSK
- Matindas, R. (2010). Mencegah kecurangan akademik (online), (<http://budimatindas.blogspot.com/2010/08/mencegah-kecurangan-akademik.html>.)
- McCabe Donal L, dkk. (2001). Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. *Ethics and Behavior*, 11(3), 219-232. *Lawrence Erlbaum Associate, Inc.*
- Mesmer-Magnus et al. (2005). Whistleblowing in Organizations : An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation. *Journal of Business Ethics*, Vol. 62
- Mulyawati, H., Masturoh, I., Anwaruddin, I., Mulyati, L. Agustendi, S., & Tartila, T.S.S. (2010). Pembelajaran studi sosial. Bandung: Alfabeta
- Mustapha, M and Ling Sing Siaw. (2012). Whistle Blowing :Perceptions of Future Accountants. *International Conference on Economics Business Inovation*, Vol. 38
- Mustapha, M and Ling Sing Siaw. (2012). Will Final Accountancy Students Whistle Blow? A Malaysian Case. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 3, No. 5
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nauli, Pigo. (2009). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Semester Awal dan Semester Akhir Terhadap Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14, No. 2
- Near, J. P and Miceli, M. P. (1995). Effective Whistleblowing. *The Academic of Management Review*, Vol. 20, No. 3.
- _____ (1996). Whistleblowing : Myth and Reality. *Journal of Management*, Vol. 22, No. 3
- Near, J. P et al. (2004). Does Type of Wrongdoing Affect the Whistle-blowing Process? *Business Ethic Quarterly*, Vol. 14, Issue. 2.
- Normadewi, Berliana. (2012). Analisis Pengaruh Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro* (tidak dipublikasikan)
- Ni Putu Ika Parianti, (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*
- O'Leary, Conor and Mohamad, Shafi. (2006). The Ethics of Final Year Accountancy Students.A Tri-national Comparation. *Malaysian*

- Accounting Review*, 5(1)
- Park, H et al. (2008). Cultural Orientation and Attitudes Towards Different Forms of Whistleblowing : a comparison of South Korea, Turkey and the UK. *Journal of Business Ethics*, 82 (4)
- Park, H and Blenkinsopp, John. (2000). Whistleblowing as Planned Behavior- Survey of South Korean Police Officers. *Journal of Business Ethics*, 85
- Pierce , B and Sweeney, B. (2009). The Relationship Between Demographic Variable and Ethical Decision Making of Trainee Accountants. *International Journal of Auditing*, 14
- Ponnu, C.H., Naidu, K and Zamri, W. (2008). Determinants of Whistleblowing. *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4, No. 1
- Poluakan, M., J., dkk (2017). Analisis Persepsi Atas Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Seseorang Menjadi *Whistleblower* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal.2695-2705
- R. Dimas Arief Yulianto. (2015). “Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesional, Dan Sensitivitas Etis Terhadap *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
<http://eprints.uny.ac.id/22254/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008), Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104124
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firm. *Accounting and Business Research*, 33(2), 137-159.
- Stansbury, Jason and Victor, Bart. (2009). Whistleblowing Among Young Employees : A Life Course Perspective. *Journal of Business Ethics*, Vol. 85
- Sudibyoy. (2005). Kebiasaan Monyontek PR terhadap Prestasi yang Diraih Seorang Siswa. *Jurnal Pendidikan Iswara Manggala*, Vol. 1 No. 6, 2005
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta
- Sulistomo, Akmal. (2012). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan. *Skripsi* Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Tuanakotta, Theodorus M. (2006). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta: FEUI.
- _____ (2007). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI)
- _____ (2010). Akuntansi Forensik dan Audit, Jakarta: Salemba Empat Investigatif
- Wijaya, Indra. (2011). Kementrian Keuangan Luncurkan Whistleblowing System”. <http://www.tempo.co/read/news/2011/10/05/087360074/kementrian-keuangan-luncurkan-whistleblowing-sistem>
- Zainur, (2012). Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Dalam

Membuat Tugas-Tugas Perkuliahan
Pada Fakultas Tarbiyah Iain Imam
Bonjol Padang. *Jurnal Al-Ta'lim*,
Jilid 1, Nomor 1 Februari

Zimbelman, Mark et al. (2006). *Fraud
Examination, 3rd Edition. Mason:
South- Western Cengage Learning*

Zyglidopoulos at al. (2008). Ethical
Distance in Corrupt Firms : How
Do Innocent Bystanders Become
Guilty Perpetrators?. *Journal of
Business Ethics*, Vol. 78